

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif, Irwandy. *Batubara Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Babbie, E. R. *The Practice of Social Research*, Belmont CA: Wadsworth, 2004
- Barkatullah, A.H., Syaifudin, Mahyuni, Ifrani. *Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- McMahon, G. *The World Bank's Evolutionary Approach to Mining Sector Reform*. Washington: The World Bank, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1998.
- Puang, V. H. M. R. *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sakti, Bimo. *Mengenal Jenis-Jenis Batuan*, Semarang: CV Aneka Ilmu, 2009.
- Sasmitha, T., Budhiawan, H., dan Sukaryadi. *Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014.
- Sonhaji, Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2003.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sukandarrumidi, Rahman, A.N., Maulana, F. W., Purnamawati, F. W., dan Miftahussalam. *Mengenal Mineral secara Megaskopis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015.
- Sushanty, V. R. *Buku Ajar Hukum Perijinan*, Surabaya: UBHARA Press, 2020.
- Sutedi, A. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Weda, Made Darma. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- R. Wiyono. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara..* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- World Bank. *2020 State of the Artisanal and Small-Scale Mining Sector*. Washington, D.C.: World Bank, 2020.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Artikel Jurnal

- Estefania, Sativa E., dan Noorliana, E. “Analisis Pertumbuhan PDB Indonesia melalui Pengembangan Sektor Pertambangan.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, No. 5 (Mei 2021).
- Hartana. “Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, No. 1 (Februari, 2017).
- Hiariej, Edward Omar Sharif. “Asas *Specialis Systematis* dan Hukum Pidana Pajak.” *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 21, No 1 (Maret 2021).
- Wibisono, Arif Fajar dan Sari, Amarria Dila. “Pendampingan Pelatihan Kewirausahaan di Desa Purwobinangun Pakem, Sleman, Yogyakarta.” *ADARMA* 9, no. 2 (Desember 2022).
- Widowati, C. “Hukum sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan.” *ADIL: Jurnal Hukum* 4, No.1 (2005).
- Rahmawati, N. A. “Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* atau *Primum Remedium*.” *Recidive* 2, no. 1 (2013).
- Santosa, Fajar. “Penerapan Konsep Batal Demi Hukum di Peradilan Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara.” *MAKSIGAMA JURNAL HUKUM* 18, No. 1 (November 2015).
- Sitepu, Sudirman. “Penanggulangan Kejahatan melalui Kebijakan Kriminal.” *Syar Madani* VIII, no. 3 (2006).

Artikel dari Majalah atau Koran

- Hiariej, Edward Omar Sharif. “*Lex Specialis* Dalam Hukum Pidana?”, *Kompas*, 12 Juni, 2018.

Penelitian Hukum Terdahulu

- Fernandes, Beny Wahyudi, “Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu di Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).
- Hayati, Tri, “Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka” (Disertasi, Universitas Indonesia, 2011).
- Purwandari, Retno, “Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C tanpa Dilengkapi Izin Pertambangan Rakyat (Studi Kasus Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro)” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019).
- Tyas, Ivan Sandy, “Implementasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batuan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah” (Skripsi, Universitas Semarang, 2019).

Website

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, “Kampung KB Sejahtera”, [kampunskb.bkkbn.go.id](http://kampunskb.bkkbn.go.id/kampung/2610/kampung-kb-sejahtera).
<https://kampunskb.bkkbn.go.id/kampung/2610/kampung-kb-sejahtera>
(diakses pada 16 Januari 2023).
- Badan Pusat Statistik, “Konsep Pertambangan”, bps.go.id,
<https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html> (diakses pada 11 Juli 2022).
- CNN Indonesia, “LBH Sebut Tambang Pasir Mestinya Tak Ada di Konservasi Merapi”, cnnindonesia.com.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201106111739-20-566647/lbh-sebut-tambang-pasir-mestinya-tak-ada-di-konservasi-merapi>.
(diakses pada 11 Juli 2022).
- Libassi, M., dkk. “2020 State of the ASM Sector Report.” delvedatabase.org.
<https://delvedatabase.org/data/countries/indonesia> (diakses pada 28 Juli 2022)/
- Pasarua, E. H. dan Jagat, L. M. S. I, “Ancaman Krisis Air di Lereng Merapi”. lbhyogyakarta.org. <https://lbhyogyakarta.org/2021/03/22/ancaman-krisis-air-di-lereng-merapi/>. (diakses pada 11 Juli 2022).
- Pasarua, E. H, “Waswas Warga Lereng Merapi Karena Tambang Pasir”. lbhyogyakarta.org. <https://lbhyogyakarta.org/2022/01/16/waswas-warga-lereng-merapi-karena-tambang-pasir/>. (diakses pada 11 Juli 2022).
- Purwobinangun, “Kondisi Umum Kalurahan Purwobinangun.” purwobinangunsid.slemankab.go.id.
<https://purwobinangunsid.slemankab.go.id/first/artikel/3> (diakses 16 Januari 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
- Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1963 tentang Pemberian Fasilitas Bagi Proyek-Proyek yang dibiayai dengan Kredit Luar Negeri Atas Dasar "*Production Sharing*".
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041.